



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Drs. BUSTAVIDIA, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640501 199303 1 006**

**STEMPEL PARAF**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	N A M A	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1				
2				
3				
4				

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>1</b>
<b>BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>3</b>
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	3
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	4
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	10
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	11
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	12
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	12
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	13
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	13
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	14
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b>	<b>15</b>
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	15
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya.	

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya
- 3.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat diatasnya 15
  2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya 15

**BAB IV PENUTUP**

**16**

**BAB I**

**DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG  
DILAKSANAKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2021 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Sebagai lembaga teknis daerah, berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan dan Pelatihan aparatur, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

**BAB II**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG  
DILAKSANAKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp18.581.101.555,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.381.531.687,- atau 93,54 %, dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja  
pada Perjanjian Kinerja**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	BB (70,93)	99,90 %
II	Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	95,24	112,04 %
		Persentase ASN Prov. Sumatera Barat yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	6,0	6,58	109,66 %
		Persentase lulusan diklat dengan predikat minimal memuaskan	84	96,33	114,67 %

**2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran**

**Tabel 2.2**

**Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran**

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	1. Pemutakhiran aplikasi untuk proses pelaksanaan kediklatan serta pusat data untuk pengembangan kompetensi aparatur				12.771.310.045	12.374.591.788	96,89
I.	<b>Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		11 dokumen	11 dokumen	100%	32.883.400	28.874.700	87,81
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. Menyiapkan draft Revisi Pergub Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sistem Satu Pintu untuk integrasi pengembangan kompetensi ASN Provinsi Sumatera Barat	7 dokumen	7 dokumen	100%	17.826.400	14.693.600	82,43
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 dokumen	4 dokumen	100%	15.057.000	14.181.100	94,18
II.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		12 bulan	12 bulan	100%	9.034.262.631	8.893.412.311	98,44
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3. Pengembangan jenis pelatihan berbasis pemecahan masalah	80 orang	80 orang	100%	8.716.235.681	8.598.944.061	98,65
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		15 orang	15 orang	100%	281.428.000	263.270.000	93,55
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 dokumen	2 dokumen	100%	16.870.650	12.537.100	74,31
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		11 laporan	11 laporan	100%	19.728.300	18.661.150	94,59
III.	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		12 bulan	12 bulan	100%	94.577.000	88.013.800	93,06
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		82 stel	82 stel	100%	57.000.000	56.992.400	99,99
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		9 orang	9 orang	100%	37.577.000	31.021.400	82,55
IV.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		12 bulan	12 bulan	100%	508.576.194	474.752.540	93,35



1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	700 buah	700 buah	100%	49.362.850	49.294.603	99,86
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57 jenis 600 orang	57 jenis 600 orang	100%	120.672.344	102.919.900	85,29
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.992 lembar	52.992 lembar	100%	35.409.000	25.945.250	73,27
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108 eksemplar	108 eksemplar	100%	13.200.000	12.600.000	95,45
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 dokumen	65 dokumen	100%	289.932.000	283.992.787	97,95
<b>V.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>249.202.480</b>	<b>247.645.000</b>	<b>99,38</b>
	Pengadaan Mebel	8 jenis	8 jenis	100%	175.354.400	174.185.000	99,33
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100%	73.848.080	73.460.000	99,47
<b>VI.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>2.089.431.900</b>	<b>1.914.480.525</b>	<b>91,63</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 surat	1.877 surat	100%	12.294.250	7.152.500	58,18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.700 kwh 6.000 m3 600 Mbps 1 rekening	328.700 kwh 6.000 m3 600 Mbps 1 rekening	100%	742.448.000	638.257.915	85,97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33 orang	33 orang	100%	1.334.689.650	1.269.070.110	95,08
<b>VII.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>	<b>762.376.440</b>	<b>727.412.912</b>	<b>95,41</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 unit	14 unit	100%	124.390.000	105.633.128	84,92
2	Pemeliharaan Mebel	84 jenis	84 jenis	100%	8.800.000	8.800.000	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	16 jenis 80 unit	16 jenis 80 unit	100%	629.186.440	612.979.784	97,42

	atau Bangunan Lainnya							
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					5.809.791.510	5.006.939.899	86,18
<b>VIII.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		180 orang	180 orang	100%	550.005.350	492.872.842	89,61
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				100%	550.005.350	492.872.842	89,61
<b>IX.</b>	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		20 JP/Tahun	20 JP/Tahun	100%	5.259.786.160	4.514.067.057	85,82
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		40 orang	40 orang	100%	33.024.000	29.440.900	89,15
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		1 dokumen 6 orang	1 dokumen 6 orang	100%	355.103.900	320.379.152	90,22
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		6 orang	6 orang	100%	96.749.800	81.125.850	83,85
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		584 orang	584 orang	100%	4.512.920.410	3.910.465.963	86,65
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		3 dokumen	3 dokumen	100%	261.988.050	172.655.192	65,90
<b>Jumlah</b>						<b>18.581.101.555</b>	<b>17.381.531.687</b>	<b>93,54</b>

**Tabel 2.3**  
**Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing**  
**Program/Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>			
<b>I.</b>	<b>Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>II.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>III.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>IV.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

	Bangunan Kantor			
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>V.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Pengadaan Mebel	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masih banyak kebutuhan untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan	Dilakukan secara bertahap	Tidak ada
<b>VI.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>VII.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Pemeliharaan Mebel	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masih banyak kebutuhan untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan	Dilakukan secara bertahap	Tidak ada
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>IX.</b>	<b>Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Untuk pengembangan kompetensi ASN memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar	Menetapkan skala prioritas dalam menentukan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan dan arahan Pimpinan Daerah	Tidak ada
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Seluruh kegiatan mempunyai keluaran yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sesuai target program, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

b. Program Pengembangan Sumber daya Manusia kegiatan :

1. Pengembangan Kompetensi Teknis
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Seluruh kegiatan mempunyai keluaran yang berorientasi kepada pencapaian target kinerja program yaitu Persentase ASN Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun, sehingga akan meningkatkan capaian program. Dan juga untuk pencapaian target meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## 2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2021 dalam menyelesaikan target pengembangan kompetensi ASN Provinsi Sumatera Barat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Kebijakan Strategis**  
**BPSDM Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2021**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Pemutakhiran aplikasi untuk proses pelaksanaan kediklatan serta pusat data untuk pengembangan kompetensi aparatur	Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Aparatur Pemerintah Provinsi Sumbar	Mempermudah proses penerimaan peserta diklat serta menyediakan data dan informasi pelaksanaan diklat, data alumni dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi aparatur
2	Menyiapkan draft Revisi Pergub Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sistem Satu Pintu untuk integrasi pengembangan kompetensi ASN Provinsi Sumatera Barat	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sistem Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	Mengintegrasikan seluruh pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di seluruh OPD lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibawah koordinasi BPSDM.
3	Pengembangan jenis pelatihan berbasis pemecahan masalah	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS),	Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan dan pendidikan yang berorientasi kepada pemecahan masalah bagi ASN sesuai bidang tugasnya.

### 2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 yang berkaitan secara langsung dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat tidak ada, karena Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia masuk ke dalam Urusan Penunjang, namun terdapat satu rekomendasi di dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dikaitkan dengan kewenangan BPSDM dalam pengembangan kompetensi ASN .

#### 1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

**Tabel 2.5**

**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan terhadap Satpol PP, baik penguatan SDM, anggaran dan pemahaman terhadap aspek hukum dalam penerapan Perda	Menyiapkan kegiatan Pelatihan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja ke dalam Rencana Kerja (Renja) 2021.	Memberi penguatan dan peningkatan kapasitas ASN Satpol PP dalam pemahaman terhadap tugas, kewajiban dan norma-norma hukum dalam penegakan Perda.



## 2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6

### Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan terhadap Satpol PP, baik penguatan SDM, anggaran dan pemahaman terhadap aspek hukum dalam penerapan Perda	Menyiapkan kegiatan Pelatihan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja ke dalam Rencana Kerja (Renja) 2021.	Memberi penguatan dan peningkatan kapasitas ASN Satpol PP dalam pemahaman terhadap tugas, kewajiban dan norma-norma hukum dalam penegakan Perda.

## 3. Tindak Lanjut rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7

### Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan terhadap Satpol PP, baik penguatan SDM, anggaran dan pemahaman terhadap aspek hukum dalam penerapan Perda	Menyiapkan kegiatan Pelatihan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja ke dalam Rencana Kerja (Renja) 2021.	Memberi penguatan dan peningkatan kapasitas ASN Satpol PP dalam pemahaman terhadap tugas, kewajiban dan norma-norma hukum dalam penegakan Perda.

#### 2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 menerima penghargaan :

**Tabel 2.8**  
**Penghargaan yang Diraih Tahun 2021**

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	BPSDM sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi di Bidang Teknis Penanggulangan Bencana.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	BPSDM Provinsi Sumatera Barat	Jakarta, 25 Oktober 2021

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

**3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN**

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 tidak ada mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan, sehingga anggaran terkait dengan tugas pembantuan nihil.

**Tabel 3.1**

**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021**

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Sumber: Dinas Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2021*

**3.2 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya.
  - a. Permasalahan (Nihil)
  - b. Upaya Penyelesaian (Nihil)
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya
  - a. Permasalahan (Nihil)
  - b. Upaya Penyelesaian (Nihil)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik

untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.